ANALISIS PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TULADENGGI KECAMATAN TALAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

[1.] Liana M. Akuba, [2] Nuzlan Botutihe,[3] Umar Sako Baderan
[123] Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial.
Universitas Muhammadiyyah Gorontalo. 96181
Email: lianaakuba@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Tuladenggi Village, Talaga Biru District, Gorontalo Regency. The research was conducted using qualitative research methods and data was collected through interviews with various relevant informants, such as the village head, village secretary, Kesos (Head of the Social Welfare Section), PKH coordinator, and BPNT beneficiary communities. The research results show that the distribution of BPNT in Tuladenggi Village is going quite well. Community access and participation in this program is equitable, with efforts to monitor and assist the beneficiaries. However, there are several obstacles faced, such as empty balances and mismatches in recipient data. Some people's BPNT balances quickly entered the recipient's account, while complaints from the majority of fellow recipients had not yet entered the balance, causing social jealousy among the community. Efforts to update data and regular monitoring were carried out to improve the quality and accuracy of the program. Good coordination between village, sub-district governments and other related parties ensures equal access. Evaluation, monitoring and feedback from beneficiaries are also used as the basis for program improvement. Maintaining continuity by being responsive to problems and beneficiary feedback is carried out to maintain program sustainability. In conclusion, the distribution of BPNT in Tuladenggi Village has been carried out with various efforts to distribute, maintain and develop quality, maintain the stability of distribution, and maintain program continuity even though there are obstacles due to recipient data so improvements need to be made in terms of updating data, more intensive monitoring, and handling the obstacles faced. Thus, the BPNT program is expected to provide more optimal benefits for the beneficiary communities.

Keywords: Analysis of the Distribution of Non-Cash Food Assistance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tuladenggi, Kecamatan Talaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai informan terkait, seperti kepala desa, sekretaris desa, Kesos (Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial), koordinator PKH, dan masyarakat penerima manfaat BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian BPNT di Desa Tuladenggi berjalan dengan cukup baik. Akses dan partisipasi masyarakat terhadap program ini merata, dengan upaya memantau dan mendampingi para penerima manfaat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti saldo kosong dan ketidaksesuaian data penerima. Sebagian masyarakat saldo BPNT cepat masuk direkening penerima sedangkan keluhan Sebagian besar sesama penerima belum masuk saldo sehingga menimbulkan kecemburuan sosial kepada masyarakat Upaya pemutakhiran data dan pemantauan rutin dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan program. Koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, dan pihak terkait lainnya memastikan pemerataan akses. Evaluasi, pemantauan, dan umpan balik dari penerima manfaat juga dijadikan dasar untuk peningkatan program. Pemertahanan kontinuitas dengn responsif terhadap masalah dan umpan balik penerima manfaat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program. Kesimpulannya, pendistribusian BPNT di Desa Tuladenggi telah dilakukan dengan berbagai upaya untuk menyalurkan, mempertahankan, dan mengembangkan kualitas, menjaga stabilitas pemerataan, serta mempertahankan kontinuitas program walaupun terdapat kendala akibat data penerima sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam hal pembaruan data, pemantauan yang lebih intensif, dan penanganan kendala yang dihadapi. Dengan demikian, program BPNT diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima manfaat.

Kata Kunci: Analisis Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan Kerentanan Pangan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Masalah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multisektoral yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat pusat sampai pada individu masyarakat. Usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak di lakukan oleh pemerintah. Perhatian serius kepada keluarga miskin terlihat dengan kebijakan-kebijakan aktifitas yang di lakukan oleh pemerintah yang sasarannya adalah keluarga miskin. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus.Salah satunya adalah Program Beras Sejahtera (Rastra, yang sebelumnya disebut Raskin).

Sesuai hasil rapat terbatas tertanggal 16 Maret 2016 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi, disepakati bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat raskin (yang kemudian disebut Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT) dilakukan melalui mekanisme nontunai (menggunakan teknologi e-voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah terjangkau. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Pelaksanaan Program BPNT tahun 2017, dianggap sebagai pilot project dan akan diperluas pada tahun berikutnya jika pelaksanaannya telah efektif dan sekaligus sebagai upaya transformasi kebijakan dari pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) secara nasional (Rachman, 2018).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertranformasi yang sebelumnya program ini bertransformasi berulang kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan Program BPNT sebenarnya untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*).

Mekanisme pendistribusian BPNT dilakukan menggunakan akun elektronik. Jadi, KPM menerima dana tunai setiap bulan yang ditransfer ke rekening masing-masing KPM bekerja sama dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan, tidak hanya beras seperti pada rastra tetapi juga telur yang ditukarkan di elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) dengan jenis dan kualitas yang tidak ditentukan alias bebas memilih. Selain itu, BPNT juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan atau hal lain yang diperlukan.Di lain sisi, keberadaan BPNT diangggap mampu berkontribusi terhadap tumbuhnya iklim

kewirausahaan melalui terciptanya koperasi dan unit-unit usaha baru di suatu wilayah. Boleh jadi, itu dapat diartikan sebagai sinyal tumbuhnya jiwa kewirausahaan di masyarakat.

Dimulai dari 44 kota dengan jumlah KPM sebanyak 1.286.194 rumah tangga dengan anggaran Rp1,69 triliun, program BPNT kini sudah dapat menjangkau lebih banyak jumlah KPM hingga mencapai 15,6 juta rumah tangga dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20,59 triliun. Program pendistribusian beras sejahtera yang lebih dikenal dengan sebutan Rastra atau BPNT, sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan Kluser 1, termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998.Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. Program Rastra tergolong program nasional. Program ini melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horizontal (Kemenko, RI. 2019).

Perusahaan Umum BULOG Divre Gorontalo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan dan usaha lain, termasuk di dalam pendistribusian beras sejahtera atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rastra. Kegiatan Bulog ini berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati / Walikota seluruh Indonesia berupaya melakukan peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan dan pengembang ekonomi pedesaan. Pemerintah secara khusus mengintruksikan kepada Perum Bulog untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Salah satu kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pihak BULOG adalah distribusi beras.Untuk saat ini beras merupakan salah satu bahan utama yang sangat penting bagi kehidupan rakyat di Indonesia. Beras adalah padi yang sudah diolah sehingga menjadi gabah lalu ditumbuk dengan menggunakan lesung sehingga gabah itu terkelupas kulitnya, gabah yang sudah dipisah itu yang bisa dinamakan beras (Ramadhanny, 2015). Komoditi beras yang dikelola oleh PERUM BULOG ada dua macam, yaitu beras komersial dan beras rastra atau yang dulu lebih dikenal dengan sebutan beras raskin. Beras yang memakai HPP (Harga Pembelian Pemerintah) sebagai acuan penetapan harga nya adalah beras rastra. Menurut BULOG (2017) Tujuan dari adanya program beras rastra ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras serta program beras rastra ini memiliki sasaran yaitu dengan adanya program beras rastra ini bisa membuat berkurangnya beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras mereka melalui penyaluran beras bersubsidi dari pemerintah melalui Perum Bulog sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

BPNT ditujukan bagi rumah tangga miskin sesuai dengan data penerima manfaat atau rumah tangga miskin dengan tujuan mengurangi beban rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagai kebutuhan dalam bentuk beras. Untuk memaksimalkan penditribusian bantuan, beberapa perbaikan diperlukan, yang didasarkan pada pengalaman pelaksanaan BPNT yang dimulai sejak 2017. Pada tahun 2022 mekanisme pendistribusian dalam sistem penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dirubah oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Yang tadinya melalui e-warung yang menjadi mitra dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), kini penerimaan lewat kantor Pos atau

dikantor-kantor kelurahan. Tidak hanya itu, bantuan yang tadinya disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk barang, kini menjadi dalam bentuk uang tunai.

Kebijakan itu diambil setelah kementerian sosial melakukan evaluasi dan rekomendasi dari Komisi VIII DPR RI maka penyaluran BPNT tak lagi menggunakan e-warung. Selain itu, penyaluran BPNT tidak menggunakan e-warung karena adanya Perpres Nomor 63 tahun 2017 (tentang bantuan sosial secara non tunai). Artinya kembali pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dengan tidak menggunakan peraturan menteri Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2019 dan tahun 2021. Pada bulan Desember tahun 2022 masyarakat Kabupaten Gorontalo mendapatkan bantuan sosial mencapai 40 milyar yang terdiri dari BLT BBM dan BPNT serta PKH. Adapun BPNT diterima selama tiga bulan tanpa ada potongan. Karena sekarang bantuan tersebut sifatnya tunai maka bebas dibelanjakan dimana saja. Artinya tidak boleh ada pengarahan masa atau masyarakat untuk membeli sembako pada warung tertentu.

Berdasarkan observasi awal di lokasi penelitian yaitu Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru Kabupaten Gorontalo terdapat 231 penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun dalam pendistribusiannya beberapa masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat dari segi waktu pendistribusian yang hanya sebagian masyarakat saldo BPNT cepat masuk direkening penerima sedangkan keluhan Sebagian besar sesama penerima belum masuk saldo sehingga menimbulkan kecemburuan sosial kepada masyarakat.

Menurut Arif (2018) Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang dan jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai

Tujuan penyaluran produk dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu :

1. Menyalurkan produk dari produsen ke konsumen Pendistribusian memiliki tujuan utama yaitu mengantarkan barang maupun jasa dari produsen ke konsumen.
2. Mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi Proses pendistribusian memberikan produsen waktu untuk lebih fokus pada kegiatan produksi. Kegiatan pendistribusi yang dilakukan oleh distributor memberikan produsen kesempatan untuk mengembangkan kualitas produksinya.
3. Menjaga stabilitas perusahaan Selain membuat fokus produsen atau perusahaan, aktivitas pendistribusian juga mampu mengembangkan saluran baru dan kesempatan bagi banyak orang. Sehingga perusahaan akan lebih banyak yang menopang dan lebih stabil.
4. Sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah Semakin banyak distirbutor dari berbagai daerah maka akan semakin banyak pula konsumen yang memperoleh produk. Produk yang diperoleh juga dapat lebih mudah untuk tersebar di berbagai wilayah.

5. Peningkatan nilai barang dan jasa Melalui kegiatan distibusi maka akan ada peningkatan nilai suatu produk.
6. Supaya proses produksi merata Kegiatan produksi dapat dilakukan secara merata bila proses pendistribusian berjalan baik. Distributor di setiap wilayah dapat mendorong kegiatan produksi di wilayah yang terdapat distributor.
7. Mempertahankan kontinuitas proses produksi Adanya distributor aktif menandakan adanya permintaan dari produk. Berdasarkan hal ini maka kegiatan produksi akan terus berjalan selagi pasar masih ada
8. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa Melalui proses pendistribusian melalui distributor maka harga produk di pasaran akan stabil. Kestabilan harga mengikuti kondisi sesuai dengan permintaan pasar (Arif, 2018)

Kajian penelitian yang relevan ini merupakan bagian yang menguraikan beberapa pendapat atau jawaban sementara yang menunjang hasil penelitian orang lain terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Diuraikan sebagai berikut:

1. Adriana. 2020, Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone)Hasil penelitian ini tentang Implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone terdapat permasalahan pada prosedur penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan persyaratan administrasi masih terbatas. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan primer pada kebutuhan pangan yang berupa beras dan telur sehingga biaya pengeluaran untuk kebutuhan tersebut dapat dialihkan pada kebutuhan yang lain misalnya kebutuhan sandang, papan, bahkan sampai pada kebutuhan sekunder
2. Tondhi Ramadhan, (2018) Efektivitas program BPNT terhadap peningkatan kesehjahteraan masyarakat kecamatan Tampan Pekanbaru. Hasil penelitian bahwa Adanya pengaruh ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan kualitas, ketepatan waktu, ketepatan harga dan tepat administrasi terhadap kepuasan masyarakat di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Efektivitas program BPNT di Kec.Tampan Pekanbaru dalam variable efektivitas secara keseluruhan termasuk kategori baik, hal ini dikarenakan program BPNT memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kesehjahteraan masyarakat.
3. Nur Fadilah (2021) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Studi Kasus Di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data dari variable tepat sasaran, tepat kulitas dan jumlah, tepat waktu, tepat harga berpengaruh positif terhadap kepuasan masyrakat. Berdasarkan pengujian menggunakan analisis model regresi komponen utama menunjukan bahwa nilai R-Square (R2) yaitu 0.584 yang artinya 58,4 % nilai kepuasan masyarakat mampu dijelaskan oleh variasi perubahan variabel tepat sasaran sedangkan sisanya 41,6% nilai kepuasan masyarakat ditentukan oleh variasi perubahan variabel lainnya yang tidak tidak masuk kedalam model regresi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Arikunto, 2019:23). Adapun dalam mengungkapkan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tuladenggi peneliti melakukan investigasi, yaitu secara bertahap peneliti berusaha memahami gejala-gejala sosial dengan membedakan, membandingkan, mengkategorikan, dan mengelompokkan obyek studi. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain" (Malik, 2011). Peneliti juga melakukan observasi langsung di Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru Kabupaten Gorontalo dan melakukan wawancara dengan informan terkait bantuan pangan non tunai (BPNT)

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data dari beberapa sumber, yang dapat dibagi atas:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan: pemerintah dan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan masalah yang dikaji. Secara rinci informan dalam penelitian ini sebagai berikut:
   a. Pemerintah Desa berjumlah 5 orang; terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan dan kaur umum, kaur pemerintahan.
   b. Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo 2 orang.
   c. Masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 12 orang
2. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tertulis dan digunakan sebagai bahan pendukung penelitian. Data sekunder akan diperoleh melalui telaah terhadap referensi perpustakaan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data, antara lain: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Profil Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru Kabupaten Gorontalo yaitu dulu sebelum Desa Tuladenggi berdiri sendiri sebahagian wilayahnya Kerajaan Dumati. Pada Kerajaan Dumati: Diperkirakan dari Dutula Yilenggi lahirlah kata "TULADENGGI "bekas sungai sekarang masih ada terbentang ditengah Desa Tuladenggi, yaitu : adanya satu bubusan pada persimpangan jalan Tuladenggi Dumati dan Jalan Ongka - Bukit Dauda yang dulu dikenal oleh masyarakat dengan istilah *Hulude Bongo*. Pada Perjalanan Raja Tilahunga: Atas peristiwa setiap penduduk yang melewati ataupun datang ditempat itu senantiasa mengingat kata raja terhadap si Denggi .Kata "Tula " si Denggi makin populer dikalangan penduduk sehinngga lama kelamaan tempat kejadian diatas lebih populer dengan nama "Tuladenggi " sebagaimana menjadi nama dari Desa Tuladenggi yang kita kenal sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang mendalam pada informan penelitian ini yang terdiri dari Pemerintah Desa, Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai dan Masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai maka diuraikan hasil penelitian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan berkaitan dengan

pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

Data hasil wawancara menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian tentang pendistribusian BPNT di Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru. Fokus perhatian perlu diberikan pada kendala saldo kosong yang dialami oleh sebagian besar KPM, karena hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, penting untuk memperhatikan perubahan aturan mengenai penggunaan dan penarikan saldo serta menjaga konsistensi dalam penyaluran bantuan.

Penyaluran BPNT di Desa Tuladenggi sekarang dilakukan dalam bentuk tunai, di mana penerima manfaat membelanjakan bantuan sendiri. Sebelumnya, BPNT disalurkan dalam bentuk paket sembako melalui BRI Link. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan dalam penyaluran bantuan BPNT. Penyaluran bantuan kepada penerima baru yang belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Sekretaris menyebutkan bahwa dalam 2 bulan terakhir, ada beberapa penerima baru yang belum memiliki KKS. Namun, mereka tetap menerima bantuan secara langsung di kantor POS. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa penerima manfaat baru tetap dapat menerima bantuan meskipun belum memiliki KKS.

Data hasil wawancara menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian tentang penyaluran BPNT di Desa Tuladenggi. Perubahan bentuk penyaluran, kendala terkait penerima baru tanpa KKS, perbandingan dengan desa lain, dan koordinasi dengan pendamping TKSK adalah aspek-aspek yang relevan untuk dipertimbangkan. Selain itu, tingkat kepuasan yang positif juga dapat menjadi indikator penting dalam evaluasi penyaluran bantuan.

Tim Koordinasi yang melakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan yang disalurkan menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kualitas bahan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat. Pemeriksaan ini penting dalam menjaga standar kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan melalui program BPNT. Sosialisasi dari pemerintah kecamatan dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) adalah salah satu upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kualitas program. Sosialisasi ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan penerima manfaat tentang program BPNT, hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya mengonsumsi pangan yang berkualitas. Penilaian yang baik menunjukkan bahwa kualitas penyaluran bantuan BPNT di Desa Tuladenggi mendapat apresiasi positif. Hal ini dapat mencakup kualitas bahan pangan, kelengkapan paket sembako, dan kinerja dalam penyaluran secara keseluruhan. Penilaian yang baik menjadi indikator bahwa upaya pemertahanan dan pengembangan kualitas telah berhasil. Adanya umpan balik dari masyarakat yang memberikan masukan dan saran merupakan aspek penting dalam pemertahanan dan pengembangan kualitas. Umpan balik ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan dalam penyaluran BPNT. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dapat membantu meningkatkan kualitas program dan kepuasan penerima manfaat.

Berdasarkan data wawancara dengan berbagai informan terkait mempertahankan dan mengembangkan kualitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tuladenggi, Kecamatan Talaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menjaga stabilitas, pemerataan, dan meningkatkan kualitas penyaluran telah dilakukan. Akses yang merata, pengawasan yang intensif, pendampingan kepada penerima

manfaat, dan kolaborasi antarpihak terkait merupakan langkah yang diambil dalam menjaga kualitas penyaluran BPNT. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti saldo kosong dan ketidakmerataan penyaluran, pihak terkait telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Proses penyaluran BPNT juga melibatkan pengawasan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pihak terkait, seperti instansi terkait, pihak pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki peran dalam memastikan kelancaran penyaluran.

PEMBAHASAN

1. Menyalurkan

Proses registrasi KPM dalam program BPNT di Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru berjalan dengan baik. Ini dapat dianggap sebagai indikator efisiensi dalam pendataan dan pendaftaran KPM yang memenuhi syarat. Menurut Kepala Desa, kualitas bantuan BPNT di Desa Tuladenggi dianggap baik. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pangan yang disalurkan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada perubahan aturan yang memungkinkan KPM untuk membelanjakan saldo di mana saja dan menarik saldonya secara tunai. Meskipun registrasi dan penyaluran bantuan berjalan baik, ada kendala yang dihadapi, yaitu saldo kosong yang dialami oleh sebagian besar KPM. Hal ini menunjukkan ada kekurangan dalam proses pendistribusian, yang perlu diperbaiki agar semua penerima manfaat mendapatkan akses ke bantuan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Jumlah penerima manfaat BPNT yang menerima bantuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam hal ini sejauh mana bantuan BPNT disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini dapat diukur dengan menghitung jumlah penerima manfaat yang berhasil menerima bantuan pada setiap periode distribusi. Contoh: Pada periode distribusi tertentu, terdapat 231 penerima manfaat BPNT yang seharusnya menerima bantuan. Indikator ini menunjukkan bahwa bantuan BPNT telah disalurkan kepada seluruh 231 penerima manfaat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Persentase penerima manfaat BPNT yang berhasil menerima bantuan dalam waktu yang tepat: Indikator ini mengukur sejauh mana bantuan BPNT dapat disalurkan dengan tepat waktu kepada penerima manfaat. Persentase ini dapat dihitung dengan membagi jumlah penerima manfaat yang berhasil menerima bantuan dalam waktu yang tepat dengan total penerima manfaat yang seharusnya menerima bantuan. Sebagai contoh: Dalam periode distribusi tertentu, hanya sebagian masyarakat yang saldo BPNT cepat masuk ke rekening mereka. Jika dari 231 penerima manfaat, hanya 150 orang yang berhasil menerima bantuan dalam waktu yang tepat, maka indikator ini menunjukkan bahwa 65% penerima manfaat BPNT berhasil menerima bantuan dengan tepat waktu.

2. Mempertahankan Dan Mengembangkan Kualitas

Terdapat upaya edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun tidak disebutkan adanya pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan KPM mengenai pentingnya memilih dan mengonsumsi bahan pangan yang berkualitas. Dengan adanya pelatihan, diharapkan KPM dapat lebih terampil dalam memanfaatkan bantuan yang diterima. Berdasarkan informasi yang

diberikan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memertahankan dan mengembangkan kualitas penyaluran BPNT di Desa Tuladenggi. Diperlukan pengawasan terhadap pedagang, pelaksanaan pelatihan kepada KPM, evaluasi objektif terhadap kualitas bahan pangan, serta peningkatan pemahaman tentang umpan balik dari KPM. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas penyaluran BPNT dapat terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang optimal kepada penerima manfaat.

3. Menjaga Stabilitas Pemerataan

Akses penyaluran BPNT di desa tersebut merata. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa sebelumnya. Bantuan BPNT sudah cukup bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut memberikan manfaat yang diperlukan oleh penerima manfaat. Penyaluran BPNT masih belum merata karena masih banyak KPM yang memiliki saldo kosong. Hal ini mencerminkan kendala yang perlu diperhatikan dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan kualitas penyaluran.

4. Peningkatan Nilai

Peningkatan nilai merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai atau manfaat yang diberikan oleh suatu produk, layanan, atau program. Hal ini melibatkan berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas, atau relevansi suatu entitas agar memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada pengguna atau penerima manfaat. Peningkatan nilai dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dalam pendistribusian BPNT. Hal ini mencakup peningkatan proses logistik, penggunaan teknologi yang tepat, serta pengelolaan yang efisien untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan cepat, tepat waktu, dan tanpa hambatan. Peningkatan nilai juga terkait dengan efektivitas program BPNT. Program yang dirancang dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima manfaat, akan memberikan nilai tambah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, dan kesejahteraan masyarakat.

5. Proses

Proses penyaluran BPNT melibatkan pengumpulan data penerima manfaat dari pusat dan pemilihan data yang dilakukan langsung ketika terjadi pergantian penerima manfaat yang tidak layak dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria yang benar-benar mendapatkan bantuan. Setelah mendapatkan informasi dari desa terkait KPM, dilakukan pengecekan langsung ke BRI Link. Tahapan ini merupakan bagian dari proses verifikasi yang dilakukan untuk memastikan keabsahan data penerima manfaat.

Sesuai dengan pendapat Purwanto dan Sulystiastuti (2014:106) tentang indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas implementasi kebijakan hal ini dikarenakan, kurangnya pendamping desa dan aparatur desa turun untuk melakukan 2664 survey ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kelayakan dari masyarakat desa sebagai kelompok sasaran, masih ada sebagian masyarakat yang mengadu karena tidak memperoleh pendistribusian BPNT padahal mereka layak untuk mendapatkannya

Dengan adanya informasi ini, dapat disimpulkan bahwa proses penentuan penerima manfaat BPNT di Desa Tuladenggi melibatkan kepala dusun, musyawarah desa, dan survei kelayakan. Tahapan penyaluran mencakup cek saldo dan penarikan dana oleh penerima manfaat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan BPNT diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria dan membutuhkan, serta memberikan kemudahan akses kepada penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan yang mereka terima.

Berdasarkan data dari berbagai informan terkait mempertahankan kontinuitas dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwa data menunjukkan bahwa akses dan partisipasi masyarakat terhadap program BPNT di Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru relatif merata. Hal ini menunjukkan upaya dalam memastikan bahwa program BPNT dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, pemerintah terkait, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting untuk menjaga kontinuitas program BPNT. Kerjasama yang baik memungkinkan pertukaran informasi yang tepat waktu, pemantauan yang efektif, dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dalam keseluruhan, upaya mempertahankan kontinuitas program BPNT di Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru telah dilakukan melalui akses dan partisipasi yang merata, koordinasi yang baik, pemutakhiran data, pemantauan rutin, serta responsif terhadap masalah dan umpan balik. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa program BPNT berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang konsisten kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian Rosalinda, (2022) menyatakan bahwa pandangan Permensos No. 20 Tahun 2019 terhadap Praktik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pasirgadung adalah sudah sesuai dengan Permensos No. 20 Tahun 2019, yaitu dari ketentuan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),

Secara keseluruhan, penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru Kabupaten Gorontalo memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Waktu penyaluran yang tepat, kualitas bantuan yang baik, penanganan kendala yang muncul, konsistensi dalam penyaluran, dan kepuasan masyarakat merupakan hal-hal penting yang perlu menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penyaluran bantuan. Evaluasi secara berkala dan perbaikan yang dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program penyaluran bantuan pangan non tunai di desa tersebut.

PENUTUP

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan cukup baik melalui proses registrasi dan verifikasi data penerima manfaat. Aksesnya juga merata dengan adanya upaya memantau dan mendampingi para

penerima manfaat. Namun, terdapat kendala seperti saldo kosong yang perlu diperbaiki. Secara umum, kualitas bantuan BPNT dinilai baik oleh masyarakat. Adanya peningkatan gizi dan kepuasan penerima manfaat menunjukkan bahwa program ini efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan. Terdapat upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerataan dalam penyaluran BPNT. Koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah terkait merupakan faktor penting dalam menjaga pemerataan. Program BPNT memberikan manfaat ekonomi bagi penerima manfaat dengan memperluas akses terhadap bahan pangan berkualitas. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Proses pendistribusian BPNT melibatkan tim koordinasi, pendampingan, dan pengawasan. Dalam menjaga kontinuitas program, penting dilakukan pembaruan data secara rutin dan pemantauan terhadap penyaluran bantuan. Pendistribusian BPNT di Desa Tuladenggi Kecamatan Talaga Biru Kabupaten Gorontalo telah dilakukan dengan berbagai upaya untuk menyalurkan, mempertahankan dan mengembangkan kualitas, menjaga stabilitas pemerataan, meningkatkan nilai, menjaga proses yang baik, serta mempertahankan kontinuitas program. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini.

- **Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Dinas Sosial perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan pihak terkait lainnya. Sinergi yang baik akan memperkuat implementasi program BPNT dan memastikan pemerataan akses serta peningkatan kualitas bantuan. kepada yang membutuhkan.
b. Bagi Pemerintah desa Perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penyaluran agar bantuan dapat diterima oleh penerima manfaat tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
c. Bagi Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan bantuan BPNT dengan bijaksana, sesuai dengan tujuan program dan kebutuhan pangan mereka. Pemahaman akan pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas juga penting untuk meningkatkan manfaat dari program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana. 2020,*Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone).*Jurnal IAIN Bone.

Arif, M. 2018. *Supply Chain Management : Konsep dan Pelaksanaan SCM, Fungsi SCM Bagi Perusahaan, Pengembangan dari SCM, Distribusi dalam SCM, Analisis Inventori, Pembelian dalam SCM, Procurement dalam SCM*. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).

Agus Suryono. 2010. Pengantar Teori Pembangunan. Malang: Universitas Negeri. Malang

Hall, James, 2011. *Sistem Informasi Akuntansi edisi 1*.Salemba Empat: Jakarta. Arens

Kartasasmita, Ginandjar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat. Jakarta

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan RI (2019) Konsistensi Penyaluran BPNT. Jakarta: Kemenko. PMK

Lapananda, Yusran. 2013. Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya

Ngusmanto. 2015. Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan. Jakarta: Mitra. Wacana Media

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai